

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

RETNO SUCIATI PUTRI

8105152227



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN EKONOMI & ADMINISTRASI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

Retno Suciati Putri, 8105152227. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan. Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh praktikan bertempat di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang beralamat di Kantor Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No. 8 Lantai 20, Jakarta Pusat 10110. Pelaksanaan PKL kurang lebih satu bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2017 dengan 5 hari kerja, Senin sampai hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Selama pelaksanaan PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, praktikan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyusunan pengelolaan keuangan dan Bagian Badan Layanan Umum (BLU). Meskipun dalam melaksanakan PKL terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan cukup baik. Praktik Kerja Lapangan yang diwajibkan kepada Para Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta bertujuan agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dalam kegiatan kerja secara langsung, sehingga praktikan mempunyai profesionalitas dalam dunia kerja dan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam dunia kerja. Dalam laporan ini menjelaskan tentang gambaran kegiatan secara umum Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta penempatan praktikan pada Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Nama Praktikan : Retno Suciati Putri

Nomor Registrasi : 8105152227

Program Studi : Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi

Menyetujui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Ekonomi



Suparno, S.Pd., M.Pd
NIP. 197908282014041001

Dosen Pembimbing



Dra. Sri Zulaihati, M.Si
NIP. 196102281986022001

LEMBAR PENGESAHAN

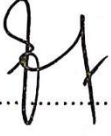


LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Suparno S.Pd M.Pd

NIP: 19708282014041 001

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
<u>Santi Susanti S.Pd., M.Ak</u> NIP. 197701132005012002		09 Januari 2018
Penguji Ahli		
<u>Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak</u> NIP. 197705172010121002		29 Desember 2017
Dosen Pembimbing		
<u>Dra. Sri Zulaihati M.Si</u> NIP. 196102281986022001		09 Januari 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Ucapan terima kasih praktikan ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain :

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua yang memberikan dukungan dan doa.
3. Bapak Drs. Dedi Purwana, E.S, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
4. Bapak Suparno, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Ekonomi
5. Ibu Dra. Sri Zulaihati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan, yang telah memberikan bimbingan dan perhatiannya kepada praktikan.
6. Bapak Arif P. Utomo, selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara yang telah memberikan kesempatan kepada praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

7. Bapak Andrianto, selaku Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan Umum (BLU) dan pendamping praktikan selama PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
8. Seluruh Karyawan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
9. Ima Siti Fatimah selaku rekan PKL yang telah bekerjasama selama PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan PKL ini terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang dapat membangun sangat diperlukan.

Akhir kata semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca sebagai peningkatan pengetahuan bagi pelaksanaan PKL Pendidikan Ekonomi Koperasi dan penerapan di dunia kerja.

Jakarta, 29 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang PKL	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	3
C. Kegunaan PKL	3
D. Tempat PKL	6
E. Jadwal Waktu PKL	7
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	
A. Sejarah Intansi	10
B. Visi dan Misi Kemenhub Dirjen Perhubungan Udara	12
C. Struktur Organisasi	17
D. Kegiatan Umum Instansi	21
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	
A. Bidang Kerja	35
B. Pelaksanaan Kerja	36
C. Kendala yang Dihadapi	39
D. Cara Mengatasi Kendala	40
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	43
B. Saran-Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Tahapan Praktik Kerja Lapangan	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Lambang Kemenhub	56
Gambar 2.2	Logo Kemenhub	57
Gambar 2.3	Bagan Susunan Organsasi Kemenhub	58
Gambar 2.4	Bagan Susunan Organisasi Dirjen Perhubungan Udara	58

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin PKL	46
Lampiran 2	Surat Keterangan PKL	48
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan	49
Lampiran 4	Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan	50
Lampiran 5	Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	51
Lampiran 6	Daftar Hadir PKL	52
Lampiran 7	Daftar Kegiatan Harian PKL	54
Lampiran 8	Lambang Kementerian Perhubungan	56
Lampiran 9	Logo Kementerian Perhubungan	57
Lampiran 10	Stuktur Organisasi Kementerian Perhubungan	58
Lampiran 11	Tampilan Neraca Satuan Kerja Bandara Sentani	59
Lampiran 12	Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja	60
Lampiran 13	Tampilan Laporan Operasional	61
Lampiran 14	Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas	62
Lampiran 15	Tampilan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja	63
Lampiran 16	Dokumentasi dengan Pegawai Kementerian Perhubungan	64
Lampiran 17	Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Pada abad perkembangan teknologi dan perumbuhan ekonomi maka kita memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handah dan siap pakai. Dengan demikian banyak lembaga pendidikan atau universitas merupakan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya dilapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang telah kita terima didunia pendidikan dan dapat mengaplikasikannya dunia bisnis atau dunia kerja. Dan mengaplikasikan pengetahuan mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja langsung ke perusahaan atau instansi yang biasa disebut magang.

PKL merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian integral dalam kurikulum yang bertujuan untuk menjembatani anantara dunia kampus dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui PKL ini diharapkan mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep-konsep dan teori yang diperoleh semasa di bangku perkuliahan dengan kenyataan operasional dilapangan kerja yang sesungguhnya sehingga pengetahuan belajar akan menjadi lebih tinggi. Semua itu akan bermuara pada peningkatan proses belajar dan sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja yang sesungguhnya.

PKL merupakan penerapan pelajaran yang sudah ada di lingkungan fakultas kemudian di praktekkan di lapangan, dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan PKL berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian.

Pendidikan dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor yang diperkenalkan secara langsung dengan orang-orang yang sudah berpengalaman didalam kantor tersebut. PKL merupakan suatu mata kuliah dengan beban 2 SKS (Sistem Kredit Semester), yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa/i Strata I (S1) yang telah memuhi syarat tertentu serta juga telah menyelesaikan SKS yang telah ditentukan. Selain hal tersebut, PKL juga wajib dikarenakan muatan PKL itu sendiri dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di era globalisasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Dunia usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur, memuaskan, cerdas dan pintar, serta memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Maka, dengan hal ini Universitas Negeri Jakarta menjadikan program PKL ini menjadi suatu kewajiban bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Program yang telah direncanakan oleh pihak universitas untuk dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik antar dunia usaha sebagai pencipta kesempatan kerjadengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik. Selain itu juga dalam PKL ini diupayakan agar mahasiswa/i benar-benar mengerti tentang tanggung jawab yang harus dilakukan dalam di dunia kerja.

B. Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan PKL ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengetahuan baru dalam dunia kerja.

Tujuan dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja
- 2) Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggungjawab dan berfikir maju.
- 3) Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa/i agar bisa lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan diri.

Maksud dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan :

- 1) Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Ekonomi & Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
- 2) Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memenuhi dunia kerja.
- 3) Mengaplikasikan teori yang didapat oleh mahasiswa di bangku perkuliahan khususnya teori Akuntansi.
- 4) Dapat memepelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan konsentrasi praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

Praktik kerja lapangan sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Praktikan, Universitas maupun instansi tempat Praktikan melaksanakan PKL.

Manfaat bagi Praktikan :

- 1) Meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktekkan langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan ke dunia kerja.
- 2) Mendapatkan pengalaman mengenai dunia kerja langsung dari tempat pembelajaran yang sesungguhnya.
- 3) Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat dan dengan profesional.
- 4) Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- 5) Menguji kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, inisiatif serta kreatifitas dalam melaksanakan setiap pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
- 6) Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- 7) Mendorong mahasiswa untuk dapat menggali berbagai masalah baru serta mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan pekerjaan.
- 8) Mengaplikasikan ilmu yang telah diterima mahasiswa selama diperkuliahan ke dalam bidang pekerjaan ditempat praktik kerja lapangan.

Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program

Studi Pendidikan Akuntansi :

- 1) Membangun hubungan kemitraan yang baik antara instansi tempat mahasiswa melakukan Praktek Kerja Lapangan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.
- 2) Mendukung kurikulum pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.
- 3) Mendapatkan umpan balik (*feedback*) berupa saran, kritik untuk menyempurnakan dan memperbaharui kurikulum yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan instansi.
- 4) Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia mahasiswi UNJ.

Manfaat bagi perusahaan tempat Praktikan melakukan Praktik

Kerja Lapangan :

- 1) Sebagai sarana mendapatkan SDM unggulan selain itu untuk mengetahui kualitas pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.
- 2) Mendapatkan ide segar, inovatif dan kreatif dari mahasiswa peserta program praktik kerja lapangan.
- 3) Mendukung pelaksanaan kegiatan CSR (*Corporation Social Responsibilities*) instansi.

- 4) Terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Universitas Ngreri Jakarta dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Nama Instansi : Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Divisi : Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Alamat : Jl. Merdeka Barat No. 8 Lantai 20, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3852649, 3456779

Website : <http://www.dephub.go.id>

Praktikan ditempatkan di bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara khususnya di Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Praktikan memutuskan melaksanakan PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara karena divisi dimana praktikan ditempatkan sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkan praktikan selama duduk di bangku perkuliahan yaitu konsentrasi pendidikan akuntansi. Praktikan memilih Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai tempat PKL karena Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara merupakan kementerian dengan reputasi yang baik.

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Jadwal waktu praktikan melaksanakan PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama satu bulan dari tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 18 September 2017. Praktikan melakukan kegiatan PKL sesuai jam kerja karyawan, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat. Mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00-13.00 kecuali hari Jumat pada pukul 11.30-13.30 WIB. Dalam proses persiapan pelaksanaan PKL dibagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. Tahap Persiapan PKL

- a. Pada tanggal 7 Juli 2017 praktikan meminta formulir pendaftaran PKL ke Gedung R Fakultas Ekonomi untuk diisi, kemudian meminta tanda tangan kepada Kepala Program Studi Pendidikan Ekonomi Bapak Suparno untuk ditandatangani. Setelah itu praktikan menyerahkan ke Biro Administrasi dan Kemahasiswaan sebagai permohonan pengajuan surat PKL. Surat pengajuan PKL tersebut ditunjukkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- b. Pada tanggal 17 Juli 2017, praktikan mengambil surat izin yang telah jadi dan langsung menuju Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengajukan permohonan izin PKL.
- c. Pada tanggal 11 Agustus 2017, praktikan mendapat kabar dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bahwa praktikan diterima untuk PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Setelah itu praktikan mendapatkan telepon

konfirmasi pelaksanaan PKL dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan diminta datang pada tanggal 14 Agustus 2017 untuk penginformasian teknis pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

2. Tahap Pelaksanaan PKL

Setelah mendapat panggilan untuk melakukan kegiatan magang pada tanggal 14 Agustus 2017, praktikan mendatangi kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengetahui hal teknis sebelum melaksanakan PKL pada tanggal 21 Agustus 2017. Setelah itu praktikan baru menjalankan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 21 Agustus 2017. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selama 1 bulan bertempat di Jl. Merdeka Barat No. 8 Lantai 20, Jakarta Pusat 10110.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 21 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 18 September 2017, dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat. Pelaksanaan kerja yang dilakukan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dimulai pada jam 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB, kecuali pada hari Jum'at pukul 11.30-13.00 WIB. Praktikan melaksanakan PKL dengan pengawasan dari

Bapak Andrianto selaku Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan Umum (BLU).

3. Tahap Penulisan Laporan PKL

Sebagai bukti pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan, Praktikan wajib menyusun laporan. Laporan tersebut akan dipertanggungjawabkan pada saat sidang PKL yang menjadi salah satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi. Praktikan menyusun laporan pada akhir bulan September 2017.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Kementerian Perhubungan mulanya bernama Departemen Perhubungan. Perubahan nama tersebut tak secara signifikan mengubah fungsi dari forum itu sendiri. Baik Kementerian Perhubungan maupun Departemen Perhubungan memiliki fungsi yang sama, sebagai "pengatur" tata cara berkendara dan berlalu lintas.

Kementerian Perhubungan yang dulunya bernama Departemen Perhubungan ini sudah berdiri sejak periode awal kemerdekaan Indonesia. Kabinet pertama yang membawahkan forum ini disebut juga Kabinet Presidensial. Periode ini dimulai pada 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Pada saat itu, Menteri Perhubungan Negara Indonesia ialah Abikusno Tjokrosujono.

Perubahan demi perubahan pun terjadi pada Kementerian Perhubungan saat itu. Masa kepemimpinan dari Abikusno pun berakhir dan digantikan dengan Ir. Abdulkarim. Kabinet kedua disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir, kabinet ini berlaku mulai 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946.

Kabinet Sjahrir berjalan hingga Kabinet Sjahrir III. Kabinet Sjahrir III ini berlangsung hingga 1947. Kabinet Sjahrir kemudian digantikan dengan Kabinet Sjarifudin I dan II. Lanjut lagi dengan perombakan-perombakan kabinet lainnya yang masih memiliki visi dan misi yang sama. Kementerian Perhubungan menjadi sebuah forum yang saat itu sepertinya cukup sibuk.

Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI, nan berlaku pada 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program nan lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda transportasi. Alat-alat transportasi tersebut dikhususkan bagi daerah-daerah. Terutama daerah nan berpotensi buat menghasilkan berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, Kementerian Perhubungan Indonesia saat itu juga memiliki program buat mengawasi serta memajukan wahana transportasi nan dimiliki. Peningkatan terus dilakukan agar pesaing nan mulai datang tak menjadi ancaman bagi alat-alat transportasi nan ada di Indonesia.

Kementerian Perhubungan Indonesia semakin berkembang sinkron dengan kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembangunan IV nan berlangsung dari 19 Maret 1983 hingga Maret 1988, Kementerian Perhubungan atau Departemen Perhubungan mulai memiliki beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan atas jenis alat transportasi. Yaitu, Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara.

Pembagian direktorat dalam forum milik pemerintah ini ditujukan buat mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah forum nan membawahkan beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri kemudian membawahkan beberapa kanwil nan tersebar di provinsi-provinsi nan ada di Indonesia.

B. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

1. Visi

“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

- a) Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b) Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
- c) Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

2. Misi

- a. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

Namun kebijakan Presiden Joko Widodo menghilangkan Visi dan Misi tingkat kementerian sehingga mulai Oktober 2014 Visi dan Misi Kementerian Perhubungan mengikuti Visi dan Misi Presiden.

Arti lambang & logo Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

a. Lambang

Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan pengejawantahan keluhuran misi KEMENHUB dalam keikutsertaan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.

Unsur lambang tersebut terdiri dari :

- 1) Sayap tujuh helai disebelah kiri dan tujuh helai di sebelah kanan
- 2) Jangkar yang menyatu dengan sayap dan ekor
- 3) Bola dunia warna biru dengan garis-garis warna emas yang menyatu dengan roda gigi sebanyak 12 buah warna emas dan 12 buah warna biru
- 4) Ekor warna emas lima helai
- 5) Padi 45 butir dan kapas 17 buah seluruhnya berwarna emas yang tangkainya diikat dengan pita warna emas berbentuk angka delapan
- 6) Seloka "Wahana Manghayu Warga Pertiwi" diletakkan di dalam jangkar warna biru
- 7) Pita warna emas dan biru diletakkan dibawah lingkaran warna mas dengan tulisan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Arti unsur-unsur pada lambang ialah :

1. Burung merupakan simbolis sarana tercepat untuk mencapai sasaran dan jangkauan perhubungan juga melambangkan Perhubungan Udara
2. Jangkar merupakan sarana kokoh dan kuat menggambarkan misi perhubungan dapat menjangkau Kepulauan Nusantara maupun seluruh

dunia dengan tabah dan tenang sekaligus melambangkan Perhubungan Laut

3. Bola dunia menggambarkan tugas dan fungsi Perhubungan melayani jasa Perhubungan ke seluruh penjuru dunia
4. Padi dan kapas berarti sandang dan pangan yang merupakan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur
5. Roda bergigi 24 terdiri dari 12 warna emas dan 12 warna biru perlambang aparat perhubungan menjalankan tugas selama 24 jam terus menerus sekaligus melambangkan Perhubungan Darat
6. Lingkaran luar warna emas perlambang keseluruhan aparat Kementerian berfungsi dalam kesatuan sistem Perhubungan Nasional
7. Pita pengikat padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Makna unsur-unsur pada lambang ialah :

- 1) tujuh helai sayap kiri dan kanan bermaknakan Sapta Prasetya KORPRI
- 2) 24 jam gigi roda bermaknakan aparat perhubungan menjalankan tugasnya selama 24 jam terus menerus melayani masyarakat
- 3) lima helai ekor bernamakan 5 Citra manusia Perhubungan yaitu :
 1. Citra untuk mampu memelihara ketertiban dan kebersihan di segala bidang
 2. Mampu membudayakan tepat waktu dalam pemberian jasa Perhubungan

3. Mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat pengguna jasa Perhubungan
 4. Mampu bertindak gesit tidak berlaku lamban
 5. Peka terhadap keluhan masyarakat namun tetap memancarkan kepribadian yang ramah
- 4) 45 butir padi 17 buah kapas yang diikat oleh simpul pita berbentuk angka bermakna tanggal, bulan dan tahun proklamasi RI yaitu 17-8-1945

Warna lambang terdiri dari warna biru tua yang melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.

b. Logo

Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Logo terdiri dari bentuk lingkaran mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

Arti dari unsur Logo ialah :

- 1) Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat
- 2) Jangkar berarti matra Perhubungan Laut
- 3) Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara
- 4) Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan

Warna logo terdiri dari warna biru langit (cerulean blue) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.

C. Struktur Organisasi

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan
- m. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan; dan
- n. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; Bagian Hukum; Bagian Kepegawaian dan Organisasi; dan Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

b. Direktorat Angkutan Udara;

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara. Direktorat Angkutan Udara terdiri atas: Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara; Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal; Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga; Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara; Subdirektorat Bimbingan Usaha Dan Tarif Jasa Angkutan Udara; dan Subbagian Tata Usaha.

c. Direktorat Bandar Udara;

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara. Direktorat Bandar Udara terdiri atas: Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara; Subdirektorat Tatanan

Kebandarudaraan dan Lingkungan; Subdirektorat Prasarana Bandar Udara; Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara; Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara; dan Subbagian Tata Usaha.

d. Direktorat Keamanan Penerbangan;

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan. Direktorat Keamanan Penerbangan terdiri atas: Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan; Subdirektorat Pelayanan Darurat; Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan; Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan, Kargo dan Barang Berbahaya; Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan; dan Subbagian Tata Usaha.

e. Direktorat Navigasi Penerbangan;

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan. Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri atas: Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan; Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan; Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan; Subdirektorat

Personel Navigasi Penerbangan; Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan; dan Subbagian Tata Usaha.

f. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri atas: Subdirektorat Standardisasi; Subdirektorat Rekayasa; Subdirektorat Produk Aeronautika; Subdirektorat Operasi Pesawat Udara; Subdirektorat Perawatan; dan Subbagian Tata Usaha.

D. Kegiatan Umum Instansi

Prioritas pembangunan transportasi udara adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan bandar udara strategis, pembangunan fasilitas keselamatan penerbangan, peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan dan peningkatan pelayanan kebandarudaraan. Prioritas pembangunan tersebut berlandaskan tekad Pemerintah Indonesia untuk memajukan sektor penerbangan sipil di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan-ketentuan ICAO lainnya.

Berdasarkan KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandar Udaraan Nasional, Indonesia memiliki Bandar Udara umum sejumlah 233 bandar udara

yang terdiri dari 29 bandar udara internasional dan 204 bandar udara domestik. Dari 233 bandar udara tersebut, sejumlah 208 bandar udara dioperasikan oleh Pemerintah dan 25 bandar udara dikelola oleh PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No.32 tahun 2011 tentang Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia bahwa pembangunan transportasi udara Indonesia dikelompokkan dalam 5 koridor ekonomi, yaitu :

1. Koridor Sumatera

- a. Perluasan gedung terminal penumpang Bandar Udara SM. Badaruddin II Palembang
- b. Pengembangan sisi darat/*private sector* dan sisi udara/*public sector* di Bandar Udara Kualanamu
- c. Pengembangan terminal di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dan pekerjaan tanah persiapan pengembangan landas pacu, dan konstruksi apron
- d. Pengembangan terminal di Bandar Udara Sultan Thaha dan pelebaran landas pacu
- e. Pengembangan terminal di Bandar Udara Raja Fisabilillah dan pemantapan shoulder

2. Koridor Jawa

- a. Pengembangan Terminal dan Peningkatan Kekuatan Konstruksi Runway di Bandar Udara Husein Sastranegara

- b. Pembangunan Bandar Udara Kertajati
 - c. Pengembangan terminal T2 dan fasilitas penunjang di Bandar Udara Juanda– Surabaya
 - d. Pembangunan Bandar Udara Internasional di Propinsi DI Yogyakarta
3. Koridor Kalimantan
- a. Percepatan pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru
 - b. Pengembangan terminal dan fasilitas penunjang Bandar Udara Balikpapan
4. Koridor Papua – Maluku
- Pengembangan terminal dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai (Overlay landas pacu dan land clearing terminal) serta pemasangan AFL.
5. Koridor Bali – NTT – NTB
- a. Pengembangan terminal penumpang internasional Bandar Udara Ngurah Rai
 - b. Pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok
 - c. Pembangunan sisi udara Bandar Udara Surabaya II/Bandar Udara Mbay
- Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara:
- 1. Pembangunan Bandar Udara Medan Baru Kualanamu
 - 2. Percepatan pembangunan Bandar Udara Baru di 24 lokasi, termasuk diantaranya percepatan pengembangan 14 Bandar Udara sesuai dengan arahan Presiden dalam Nota Keuangan Tahun 2011 antara lain:
 - a. Bandar Udara Muara Bungo – Jambi

- b. Bandar Udara Muara Teweh Baru – Kalimantan Tengah
- c. Bandar Udara Morowali – Sulawesi Tengah
- d. Bandar Udara Tojo Una Una – Sulawesi Tengah
- e. Bandar Udara Bone – Sulawesi Selatan
- f. Bandar Udara Saumlaki Baru – Maluku
- g. Bandar Udara Tual Baru (Ibra) – Maluku
- h. Bandar Udara Surabaya II (Mbay)
- i. Bandar Udara Miangas – Sulawesi Utara
- j. Bandar Udara Tebelian – Kalimantan Barat
- k. Bandar Udara Moa – Maluku
- l. Bandar Udara Werur – Papua Barat
- m. Bandar Udara Kuffar – Seram Bagian Timur
- n. Bandar Udara Namniwel – Maluku
- o. Bandar Udara Waisai Raja Ampat – Papua Barat
- p. Bandar Udara Enggano – Bengkulu
- q. Bandar Udara Sumarorong Tahap II – Mamasa
- r. Bandar Udara Sinak Baru – Papua
- s. Bandar Udara Waghete Baru – Papua
- t. Bandar Udara Kamanap Baru – Papua
- u. Bandar Udara Purukcahu – Kalimantan Barat
- v. Banda Udara Pekonserai – Lampung Barat
- w. Bandar Udara Bawean – Jawa Timur
- x. Bandar Udara Buntu Kunik – Sulawesi Selatan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga telah melakukan pengembangan dan rehabilitasi bandar udara di daerah perbatasan dan rawan bencana yaitu :

- a. Lanjutan pembangunan prasarana bandar udara, keamanan dan navigasi penerbangan di Bandar Udara Cut Nyak Dhien-Nagan Raya, Lasikin Sinabang, Cut Ali Tapanuli, Dr. Fl. Tobing-Tapanuli Tengah, Minangkabau Binaka-Gunung Sitoli, Lasondre-PP. Batu, Sipora Rokot, Fatmawati Soekarno, Enggano, Muko-Muko, Komodo-Labuhan Bajo, Umbu Mehang Kunda-Waingapu, H.H Aroeboesman-Ende, Frans Seda-Maumere, Gewanyantana-Larantuka, Wunopito-Lewoleba, Bade, Wahai, Babullah-Ternate, Naha-Tahuna, Melongguane, Numfor, Soejarwo Tjondronegoro-Serui dan Nabire, Werur, Namrola
- b. Lanjutan pembangunan prasarana bandar udara keamanan dan navigasi penerbangan di Bandar Udara Maimun Saleh-Sabang, Pangsuma Putussibau, Nunukan, Bokondini, Tanah Merah-Merauke, Marerena-Sarmi, Mopah-Merauke, Kisarm Haliwen-Atambua, Lekunik-Rote, Tardamu-Sabu dan Mali Alor, Miangas Serta meningkatkan kemampuan daya dukung landasan sehingga dapat didarati pesawat yang lebih besar

Pelaksanaan dari *Eco Airport* (bandar udara ramah lingkungan), sesuai dengan standar ICAO, telah menjadi salah satu prioritas utama bagi Pemerintah Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan bertujuan pada konservasi lingkungan hidup dan pengoptimalisasian penggunaan bahan bakar alternatif yang dapat digunakan secara jangka panjang, Indonesia telah

membentuk Dewan Pengelola Lingkungan Hidup Bandar Udara (*Eco Airport Council*) yang merupakan sebuah kelompok kerja di bandar udara yang menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta pemantauan lingkungan hidup.

Pelaksanaan *Eco Airport* tersebut telah dilaksanakan pada 5 (lima) Bandar Udara Internasional sebagai *pilot project* di Indonesia yaitu Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang; Bandar Udara Juanda–Surabaya; Bandar Udara Ngurah Rai-Denpasar; Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II–Palembang; Bandar Udara Hang Nadim, Batam.

Sebanyak 47 rute, menghubungkan 12 kota di dalam negeri dan 20 kota di luar negeri, sedangkan rute luar negeri yang dilayani perusahaan penerbangan asing sebanyak 96 rute, menghubungkan 16 kota dalam negeri dan 39 kota luar negeri. Dalam menghubungkan daerah terisolasi atau terpencil yang belum tersedia moda transportasi lain, mendorong pembangunan atau pertumbuhan daerah, serta menghubungkan daerah yang dekat dengan perbatasan negara lain atau menjaga stabilitas wilayah dilakukan program pembangunan bandar udara-bandar udara UPT yang melayani angkutan udara perintis.

Untuk penerapan kebijakan ASEAN *Open Sky* pada tahun 2015, Indonesia saat ini telah mempersiapkan 5 (lima) bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Soekarno Hatta-Tangerang; Bandar Udara Kualanamu-Medan; Bandar Udara Juanda, Surabaya; Bandar Udara Ngurah

Rai, Denpasar dan Bandar Udara Hasanuddin, Makassar untuk melayani penerbangan- penerbangan regional melalui persetujuan ilateral.

Sampai dengan posisi saat ini, rute penerbangan komersial dalam negeri sebanyak 222 rute, yang menghubungkan 107 kota dalam negeri. Untuk rute penerbangan luar negeri yang dilayani oleh badan usaha angkutan udara nasional Air Charter yang menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan; PT. ASI Pudjiastuti Aviation yang menjangkau wilayah Kalimantan Timur, Papua Barat dan Papua; PT. Trigana Air Service yang menjangkau wilayah Timika (Papua); PT. Nusantara Buana Air yang menjangkau wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, PT. Jhonlin Air Transport yang menjangkau wilayah Timika (Papua). Keseluruh penerbangan tersebut dilayani oleh 5 (lima) tipe pesawat udara perintis yaitu DHC-6, CASA-212, CESSNA, CARAVAN dan PC-6.

Sampai dengan tahun 2011 tersedia 132 rute angkutan udara perintis di 13 propinsi sebagai pendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Dalam mendukung kegiatan angkutan udara perintis di Indonesia, terdapat 7 (tujuh) Perusahaan angkutan udara niaga yang melayani rute angkutan udara perintis yakni PT. Merpati Nusantara yang menjangkau wilayah Maluku, Papua Barat dan Papua; PT. Aviastar Mandiri yang menjangkau wilayah Kalimantan Tengah; PT. Sabang Merauke Raya.

Dalam mengimplementasikan standar keamanan dan keselamatan penerbangan, Indonesia telah memformulasikan program keamanan dan keselamatan penerbangan melalui *National Civil Aviation Security Program* dan *State Safety Program* dengan menerapkan *Safety Management System* (SMS) sebagai program keselamatan penerbangan dan *Security Management System* (SeMs) sebagai sebuah program keamanan penerbangan kepada seluruh stakeholders.

Safety Oversight dilakukan dalam berbagai kegiatan berupa *Safety Audits* setiap 2 (dua) tahun sekali kepada seluruh operator penerbangan dalam rangka perpanjangan AOC; *Flight Operations Surveillance* setiap 1 (satu) bulan sekali; *Maintenance Surveillance* setiap 1 (satu) bulan sekali, *Ramp Inspections* setiap 1 (satu) bulan sekali dan *Annual Inspections* untuk Sertifikat Kelaikan Udara setiap 1 (satu) tahun sekali untuk seluruh pesawat udara.

Indonesia memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan melalui kerjasama dengan ICAO yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *Management Services Agreement* (MSA) *Annex 1 enhancement of safety oversight capability of DGCA – Project INS/07/802*, *Annex 2* tentang *Civil Aviation Transformation Team* (CATT), *Annex 3* tentang Kerja Sama Badan Diklat dan *Annex 4* tentang Pembukaan Kantor Perwakilan di Montreal. Terkait MSA *Annex* ke-4 dibuka Kantor Kepentingan RI untuk ICAO di Montreal, Kanada. Dalam menjamin keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan dibentuk Otoritas Banda Udara di 10 (sepuluh) wilayah, yaitu :

1. Kantor Otoritas Bandar Udara kelas Utama Wilayah I Soekarno Hatta yang mengawasi DKI, Banten, Jabar, Lampung dan Kalimantan Barat;
2. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah II Polonia Medan yang mengawasi N.A.D, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau;
3. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah III Djuanda Surabaya yang mengawasi Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan;
4. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah IV Ngurah Rai Denpasar yang mengawasi Bali, NTB dan NTT;
5. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Wilayah V Hasanuddin Makassar yang mengawasi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat;
6. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VI Minangkabau Padang yang mengawasi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat dan Jambi;
7. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VII Sepinggan Balikpapan yang mengawasi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;
8. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah VIII Sam Ratulangi Manado yang mengawasi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku;
9. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah IX Rendani Manokwari yang mengawasi Papua Barat, Biak dan Nabire;
10. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II Wilayah X Mopah Merauke yang mengawasi Papua;

Untuk mendukung pengoperasian penerbangan yang efisien ramah lingkungan berbasis teknologi mutakhir, sejalan dengan program Asia Pasifik, Indonesia telah menginstalasi *ADS-B Station* di 30 lokasi untuk melengkapi layanan radar; menginstalasi *MSSR Mode S* pada 7 bandar udara yang memiliki tingkat kepadatan *traffic* yang tinggi; memutakhirkan *Air Traffic Automation System* di Makassar (*The Makassar Advanced ATC System/MAATS*) termasuk kemampuan untuk memproses ADS-B; penggantian *The Jakarta Advanced ATC System/JAATS* agar sesuai dengan teknologi baru CNS/ATM; menginstalasi ATN (sistem *Aeronautical Telecommunication Network*) di Makassar dan Jakarta; program perdana menggunakan ADS/CPDLC di Makassar *Flight Information Region (FIR)*; Implementasi PBN (RNAV 5 untuk en-route, RNAV GNSS untuk pendekatan dan RNAV 1 untuk SID/STAR).

Pertumbuhan industri penerbangan yang sangat cepat dan berkelanjutan, memerlukan personil penerbangan yang andal dan kompetitif. Saat ini, industri penerbangan nasional telah didukung oleh sejumlah besar personil penerbangan yang terdiri dari 7.835 penerbang, 1.062 petugas *Air Traffic Controller*, dan 6.374 teknisi pesawat udara. Disamping itu, pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia juga didukung oleh sejumlah perusahaan maskapai penerbangan nasional dan armada pesawat udara yang mampu mengakomodir tingginya tuntutan atas kebutuhan penerbangan di Indonesia.

Saat ini, terdapat 20 (dua puluh) maskapai penerbangan di bawah AOC 121 serta 34 (tiga puluh empat) operator di bawah AOC 135 dengan jumlah pesawat udara di bawah AOC 121 sebanyak 1144 pesawat, AOC 135 sebanyak 237 pesawat serta di bawah AOC 137 sebanyak 1 pesawat, OC 91 sebanyak 10 pesawat, *Pilot School* dan *Aerosport* sebanyak 188 pesawat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan strategi dan program aksi antara lain:

1. Proaktif terhadap pencegahan kecelakaan penerbangan melalui program evaluasi kinerja bandar udara maupun operator penerbangan;
2. Peningkatan kehandalan peralatan navigasi penerbangan melalui peremajaan sistem pengaturan lalu lintas udara terutama yang melayani ruang udara di wilayah barat Indonesia (*Jakarta Automation Air Traffic System*) atau JAATS;
3. Peningkatan pemanfaatan sistem pengaturan lalu lintas udara di wilayah timur *Indonesia Makassar Air Traffic* (MATSC);
4. Wilayah udara yang tidak terjangkau oleh radar diberikan layanan penginderaan dengan *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* (ADS-B) untuk upper level. Peremajaan fasilitas navigasi penerbangan yang beroperasi lebih dari 15 tahun;
5. Pemasangan fasilitas bantu navigasi penerbangan di Luwuk, Poso, Oksibil dan Kotabaru;

6. Melakukan penilaian kinerja operator penerbangan terhadap kepatuhan pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan sipil berdasarkan CASR 121 (AOC 121) maupun yang beroperasi berdasarkan CASR 135 (AOC 135), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan Penilaian Kategori AOC 121/135 periode ke 12;
7. Melakukan audit investigasi terhadap pesawat yang beroperasi dengan pemberian sanksi kepada operator yang tidak melaksanakan ketentuan : *Cockpit enroute inspection, Cabin enroute inspection, Station facilities inspection, Training program inspection*. (Catatan : dilakukan setiap saat secara random).
8. melakukan kerjasama melalui realisasi program sebagai berikut:
 - 1) ITSAP CASA Australia
 - a. Pelatihan bagi 72 Inspektur Kelaikkan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
 - b. *Accident & Investigation Training, Training of SMS for Airlines, AMO dan Training Organization*
 - c. *Safety Promotion, Program Pemeliharaan Pesawat Tua, Human Factor in Fasting Workshop*
 - 2) *ICAO Enhancement of Safety Oversight Capability of DGCA (4 ICAO Experts)*
 - a. *Flight Operation and Cabin Safety Inspector Training for new Hired Inspectors*
 - b. *Maintenance En-Route Inspection Training and OJT*

- c. *Maintenance Surveillance Supervision*
 - d. *Dangerous Good Training*
 - e. *Beyond Risk Management Training*
 - f. *Certification of Approved Maintenance Organization, etc*
- 3) EU/EASA
- a. *Design Organization Approval (DOA) Training, Workshop dan OJT;*
 - b. *EASA Second International Cooperation Forum;*
 - c. *Airworthiness Management Training oleh Pemerintah Swedia.*
- 4) FAA
- a. *Runway Safety Training*
 - b. *DGCA Organization Structured Study*
- 5) JICA
- a. *Safety Audit Procedure and Risk Assesment Training;*
 - b. *Inspector Training for Airworthiness and Flight Operation.*
- 6) DGLM-Netherland
- a. *SMS Training on JAA Training Organization;*
 - b. *International Regulation for Air Transport Training*
 - c. *SMS Workshop*
- 7) Australia
- a. *Indonesia-Australia Avsec Project (IAAP)*
 - b. *Australia Leadership Awards Fellowship (ALAF)*
 - c. *Avsec Forum Annual Meeting*
 - d. *Penempatan Australian Avsec Adviser di Bandara Ngurah Rai-Bali*

- e. Penempatan *Australian Avsec Adviser* di Direktorat Keamanan Penerbangan
- 8) Jepang
- a. Bantuan fasilitas keamanan penerbangan di beberapa bandara Indonesia;
 - b. *Professional Development Course and Workshop*

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang berlokasi di Jl. Merdeka Barat No. 8 Lantai 20, Jakarta Pusat 10110.

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara khususnya di Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara khususnya di Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, monitoring pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pembinaan dan penyusunan revisi DIPA, serta realisasi anggaran, penatausahaan, pembinaan, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan *e-monitoring*, serta penyiapan bahan audit laporan keuangan.

Praktikan diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan penyusunan pengelolaan keuangan dan Bagian Badan Layanan Umum (BLU). Pada bidang kerja tersebut, praktikan mengerjakan tugas yaitu :

1. Pemeriksaan laporan keuangan dari Satuan Kerja dan Pusat. Seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan

operasional anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

2. Mengoreksi laporan keuangan seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan operasional anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.yang berasal dari Satuan Kerja.

B. Pelaksanaan Kerja

Dalam melaksanakan praktik kerja di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang di mulai sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan 18 September 2017, dengan hari kerja yaitu hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Praktikan dibantu oleh para karyawan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat memahami tugas praktikan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Mereka memberikan arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Praktikan diposisikan di bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara khususnya di Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan yang berada di kantor pusat Kementerian Perhubungan dengan pembimbing dari salah satu staff di bagian tersebut yaitu Bapak Andrianto yang menjabat sebagai Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan NIP : 198001052003121001.

Pada hari pertama kerja, praktikan diperkenalkan dengan karyawan serta dijelaskan mengenai beberapa unit kerja yang ada di bagian Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Setelah itu dilakukan penempatan posisi dimana praktikan akan menjalankan Praktik Kerja Lapangan selama 1 (satu) bulan. Setelah ditempatkan di Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan, praktikan diberi penjelasan mengenai pembagian tugas serta langkah-langkah kerja yang harus dilakukan untuk tugas tersebut. Setelah penjelasan tersebut, praktikan diberikan beberapa tugas atau pekerjaan yang akan dilakukannya selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu:

1. Pemeriksaan Laporan Keuangan dari Satuan Kerja dan Pusat

Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan untuk memeriksa data laporan keuangan yang dikirim dari satuan kerja dengan yang dicatat oleh bagian pusat. Praktikan memeriksa laporan keuangan yang dikirim oleh Bandar Udara Sentani Papua. Prosedur yang dilakukan dalam memeriksa laporan keuangan dari Satuan Kerja adalah:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerima LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dalam bentuk ADK (Arsip Data Komputer) yang dikirim oleh Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua.
2. Mengakses aplikasi E-Rekon-LK untuk membuka LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua yang telah dicatat oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).

3. Praktikkan memeriksa dan menyamakan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yang dikirim dari Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan yang ada di aplikasi E-Rekon-LK.

2. Mengoreksi Laporan Keuangan dari Satuan Kerja

Mengoreksi laporan keuangan ini dilakukan untuk mengoreksi adanya kesalahan dalam data laporan keuangan yang dikirim dari satuan kerja dengan yang dicatat oleh bagian pusat. Praktikkan mengoreksi laporan keuangan yang dikirim oleh Bandar Udara Sentani Papua.

Prosedur yang dilakukan dalam mengoreksi laporan keuangan dari Satuan Kerja adalah saat memeriksa LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua, praktikkan meng*cross-check* akun-akun yang anggarannya sama antara yang dikirim Satuan Kerja dengan yang ada di aplikasi E-Rekon-LK. Selanjutnya ketika praktikkan menemukan adanya selisih alias perbedaan data dalam hasil LRA (Laporan Realisasi Anggaran) tersebut, praktikkan segera menandai untuk selanjutnya dilaporkan oleh bagian Pusat ke Satuan Kerja Bandar Udara Sentani Papua untuk segera di koreksi kembali. Biasanya penyebab terjadinya selisih data LRA (Laporan Realisasi Anggaran) Satuan Kerja dengan bagian Pusat yaitu karena Satuan Kerja salah menginput laporan keuangan baik itu kode akun maupun realisasinya; Satuan Kerja belum melakukan revisi anggaran; dan aplikasi yang digunakan Satuan Kerja

kurang sempurna terkait *update* data laporan keuangan. Setelah menghubungi Satuan Kerja untuk melaporkan adanya selisih, Satuan Kerja akan mengoreksi kembali lalu mengirim ulang LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yang sudah benar yang sesuai dengan yang ada di aplikasi E-Rekon-LK.

C. Kendala Yang Dihadapi

Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, praktikan berusaha mengerjakan pekerjaan dengan baik yakni pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Namun dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa kendala yang mengganggu kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan.

1. Ketelitian dalam mengoreksi data dari ADK (Arsip Data Komputer) satker dan data dari Kementerian Keuangan yang menggunakan aplikasi E-Rekon-LK.
2. Banyaknya akun-akun dalam laporan keuangan yang digunakan jarang didengar.
3. Pekerjaan sering terhambat karena adanya selisih diantara kedua laporan keuangan tersebut..
4. Tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk pemegang sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh

praktikan ditempat PKL. Praktikan hanya akan bekerja saat ada yang meminta bantuan dan ketika praktikan inisiatif menawarkan bantuan.

D. Cara Mengatasi Kendala

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka langkah yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

1. Lebih teliti dan cermat dalam melakukan pekerjaan

Dalam mengoreksi data sangat membutuhkan ketelitian, hal ini merupakan tantangan di mana praktikan dituntut untuk dapat lebih cermat, teliti serta sabar dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak terjadi kesalahan dan kinerja praktikan berjalan secara efisien dan efektif. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹. Dari pengertian di atas praktikan dituntut untuk lebih teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan serta praktikan harus selalu membiasakan diri menggunakan aplikasi yang digunakan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mengoreksi data seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi pengembalian belanja, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas.

¹ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 164

2. Mengingat akun-akun dalam laporan keuangan yang sering digunakan dalam melakukan pekerjaan.

Praktikan berusaha mengingat dan mencatat apa saja akun-akun dalam laporan keuangan yang sering digunakan, sehingga memudahkan dalam bekerja dan mengoreksi laporan keuangan.

3. Pekerjaan sering terhambat karena adanya selisih diantara kedua laporan keuangan tersebut

Banyak hal yang mengakibatkan terjadinya selisih yaitu satker melakukan kesalahan pada saat penginputan baik kode akun maupun realisasi, belum melakukan revisi anggarannya serta aplikasi yang kurang sempurna terkait updatetannya. Cara mengatasinya adalah dengan mengoreksi lagi data di pusat dan mengkoordinasikan dengan satker untuk mencari perbedaannya.

4. Susun SOP (*Standard Operating Procedure*) untuk pemegang

SOP (*Standard Operating Procedure*) atau kadang disingkat POS, adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi, tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh POS². Maka dari itu pihak perusahaan hendaklah menyusun SOP bagi praktikan agar dapat bekerja

² Diakses pada tanggal 23 November 2016
https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur_operasi_standar

sesuai dengan SOP yang berlaku diperusahaan tersebut. Sehingga dapat mempermudah bagi para praktikan perusahaan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Selama 1 bulan praktikan melakukan PKL di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, praktikan dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKL sangat berguna, dimana:

1. Praktikan dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki karena sesuai antara kemampuan yang praktikan miliki dibidang akuntansi, yang didapat selama kegiatan perkuliahan, dengan bidang kerja tempat pratikan diposisikan, yaitu bagian Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan Umum (BLU).
2. Praktikan dapat mengetahui secara langsung mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika akan mengoreksi data dari ADK (Arsip Data Komputer) Satuan Kerja dan data dari Kementerian Keuangan yang menggunakan aplikasi E-Rekon-LK, seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi pengembalian belanja, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas., tujuan dilakukannya, dan prosedur pengkoreksian laporan keuangan seperti apa.
3. Praktikan menyadari kekurangan yang dimiliki selama pelaksanaan PKL. Praktikan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika kelak praktikan memilih pekerjaan sebagai Penata Laporan Keuangan dan Badan Layanan Umum (BLU) .

B. Saran

1. Praktikan lain

Harus mencoba memilih tempat praktek kerja yang baru, yang sebelumnya belum pernah ada mahasiswa UNJ yang melakukan praktek kerja disana, baik instansi maupun perusahaan-perusahaan besar. Selain merupakan suatu tantangan tersendiri bagi praktikan, dengan masuknya praktikan ke instansi/perusahaan tersebut, maka nama FE UNJ akan semakin dikenal oleh publik.

2. Fakultas Ekonomi UNJ

Sebaiknya masing-masing jurusan tetap membina hubungan kerjasama yang baik setelah praktek kerja selesai, sehingga dalam kesempatan lain perusahaan/instansi tersebut mau bekerjasama kembali dengan FE UNJ, terutama dalam kegiatan mahasiswa.

3. Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Kesempatan yang diberikan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berupa kesempatan untuk praktek kerja, merupakan hal yang berguna untuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Semoga dengan terjalinnya hubungan kerjasama ini antara pihak FE UNJ dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dapat memberikan peluang dikemudian hari bagi praktikan ataupun mahasiswa lainnya untuk magang, bekerja, atau bentuk kerjasama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

<http://ppid.dephub.go.id/index.php?page=viewdmdocuments&kategori=Buku-Profil-Perhubungan>

<http://www.dephub.go.id>

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

UNJ, FE. *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. 2012

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 489848
Laman : www.unj.ac.id

17 Juli 2017

Nomor : 1386/UN39.12/KM/2017
Lamp. : 1 lembar
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Bagian Keuangan dan BMN
Kementerian Perhubungan RI
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta Barat 10110

Kami mohon kesediaan saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Sebanyak : 4 Orang (Retno Suciati Putri, dkk) Daftar Nama Terlampir.
Dalam Rangka : Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan
Pada Tanggal 1 Agustus s.d. 1 September 2017
No. Telp/HP : 081574995930

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH
19630403 198510 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Pendidikan Ekonomi

No	Nama	NIM	No Telp
1	Ima Siti Fatimah	8105150305	082299114059
2	Retno Suciati Putri	8105152227	081574995930
3	Sania Fadhillah	8105152055	088809816692
4	Winda Triana	8105153013	089695897099

Ketua Kelompok



Retno Suciati Putri

8105152227

Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Lapangan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Faks : 3505135 - 3505139
3507674

SURAT KETERANGAN

Nomor : 246 / Ker / K / 2017

1. Berdasarkan Surat Keterangan Permohonan Kepala Biro Akademik dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan surat Nomor : 186/UNJ39.12/KM2017 tanggal 17 Juli 2017, dengan ini telah melaksanakan Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, terhitung sejak bulan Agustus dan September 2017, atas nama:

Nama Siswa/i : RETNO SUCIATI PUTRI
Sekolah/Kampus : UNIVERSITAS MEGERI JAKARTA (UNJ)
Kelas/Jurusan : PENDIDIKAN EKONOMI
NIM : 810 515 2227

**“Dengan Hasil Sangat Baik”
(Daftar Nilai Terlampir)**

2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Oktober 2017

Pembimbing Materi

ANDRIANTO

Nip. 19800105 200312 1 004

Kasubag Akuntansi dan Perbendaharaan

ARIF PRIYO UTOMO, M.Ak

Np. 19810711 200604 1 001



Tembusan :

Kepala Biro Akademik dan Hubungan Masyarakat UNJ

Lampiran 4 : Daftar Nilai Praktik Kerja Lapangan

DAFTAR NILAI

BAGIAN KEUANGAN
 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nama : RETNO SUCIATI PUTRI
 Kampus / Fakultas : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)
 Kelas / Jurusan : PENDIDIKAN EKONOMI
 NIM : 810 515 2227

NO	MATERI	Nilai		Keterangan
		Angka	Huruf	
A. UMUM				
1.	Kejujuran	90	Sembilan puluh	B
2.	Ketekunan	91	Sembilan puluh satu	A
3.	Penampilan	91	Sembilan puluh satu	A
4.	Kerja Sama	91	Sembilan puluh satu	A
5.	Prakarsa / Inisiatif	90	Sembilan puluh	B
6.	Disiplin & Tanggung Jawab	91	Sembilan puluh	A
B. KETERAMPILAN / KEAHLIAN				
1.	Kemampuan Komunikasi	91	Sembilan puluh satu	A
2.	Penguasaan Komputer	91	Sembilan puluh	B
Jumlah		726	Tujuh ratus dua enam	

Pembimbing Materi

ANDRIANTO
 NIP. 19800105 200312 1 001

Kasubag Akuntansi dan Perbendaharaan

ARIF PRIYO UTOMO, M.Ak
 NIP. 19810711 200604 1 001



Kriteria Penilaian


91 - 100 : A (Sangat Baik)
 81 - 90 : B (Baik)
 71 - 80 : C (Cukup)
 61 - 70 : D (Sedang)
 < 60 : E (Kurang)

Lampiran 5 : Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Bulan/ Tahap	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Persia pan						
Pelaks anaan PKL						
Pelap oran						


Tabel I.1 Tahapan Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 6 : Daftar Hadir PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI



Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227/4706283, Fax: (021) 4706283
 Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2... SKS

Nama : RETNO SUCIATI PUTRI
 No. Registrasi : 8103152223
 Program Studi : PENDIDIKAN EKONOMI
 Tempat Praktik : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 Alamat Praktik/Telp : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Kerja Lt. 20 Jakarta 10013

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 21 Agustus 2017	1.	
2.	Selasa, 22 Agustus 2017	2.	
3.	Rabu, 23 Agustus 2017	3.	
4.	Kamis, 24 Agustus 2017	4.	
5.	Jumat, 25 Agustus 2017	5.	
6.	Senin, 28 Agustus 2017	6.	
7.	Selasa, 29 Agustus 2017	7.	
8.	Rabu, 30 Agustus 2017	8.	
9.	Kamis, 31 Agustus 2017	9.	
10.	Senin, 4 September 2017	10.	
11.	Selasa, 5 September 2017	11.	
12.	Rabu, 6 September 2017	12.	
13.	Kamis, 7 September 2017	13.	
14.	Jumat, 8 September 2017	14.	
15.	Senin, 11 September 2017	15.	

Jakarta, 11 September 2017.
 Penanda Tangan


 198001052003121008

Catatan :
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2.. SKS

Nama : RETNO SUCIATI PUTRI
No. Registrasi : 810516227
Program Studi : PENYUSUNAN EKONOMI
Tempat Praktik : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN UDARA
Alamat Praktik/Telp : Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Gedung
Karya Lt. 20 Jakarta Pusat

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Selasa, 12 September 2017	1. [Signature]	
2.	Rabu, 13 September 2017	2. [Signature]	
3.	Kamis, 14 September 2017	3. [Signature]	
4.	Jumrah, 15 September 2017	4. [Signature]	
5.	Senin, 18 September 2017	5. [Signature]	
6.		6. [Signature]	
7.		7.	
8.		8.	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	

Jakarta, 14 September 2017
Ponitah



Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 7 : Daftar Kegiatan Harian PKL

Minggu 1	Minggu 2
Senin	Senin
Mengenal lingkungan kerja dan ditunjukkan bagaimana cara kerja bidang akuntansi	Fotokopi surat & nomer in berkas,
Selasa	Selasa
Fotokopi surat dan ngisi data surat masuk & surat keluar	Mengoreksi data dari ADK (Arsip Data Komputer) Satuan Kerja dan data dari Kementerian Keuangan yang menggunakan aplikasi E-Rekon-LK, seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi pengembalian belanja, laporan operasional, serta laporan perubahan ekuitas.
Rabu	Rabu
Menata berkas dari tahun 2014-2017	Mengoreksi data dari ADK (Arsip Data Komputer) Satuan Kerja dan data dari Kementerian Keuangan yang menggunakan aplikasi E-Rekon-LK, seperti neraca berbasis akrual, laporan realisasi anggaran, laporan realisasi pengembalian belanja, laporan
Kamis	
Nomer in berkas, ngisi data surat masuk & surat keluar	
Jumat	
Tidak ada kegiatan kantor	

	<p>operasional, serta laporan perubahan ekuitas.</p> <p>Kamis</p> <p>Tidak ada kegiatan kantor</p>
<p>Minggu 3</p> <p>Senin</p> <p>Mengisi data surat masuk & surat keluar</p> <p>Selasa</p> <p>Fotokopi surat & merapihkan berkas dari tahun 2014-2017</p> <p>Rabu</p> <p>Nomerin berkas,</p> <p>Kamis</p> <p>Fotokopi surat & nomerin berkas,</p> <p>Jumat</p> <p>Tidak ada kegiatan kantor</p>	<p>Minggu 4</p> <p>Senin - Jumat</p> <p>Tidak ada kegiatan kantor karena pembimbing dinas.</p> <p>Minggu 5</p> <p>Senin</p> <p>Tidak ada kegiatan kantor karena pembimbing dinas.</p>

Lampiran 8 : Lambang Kementerian Perhubungan



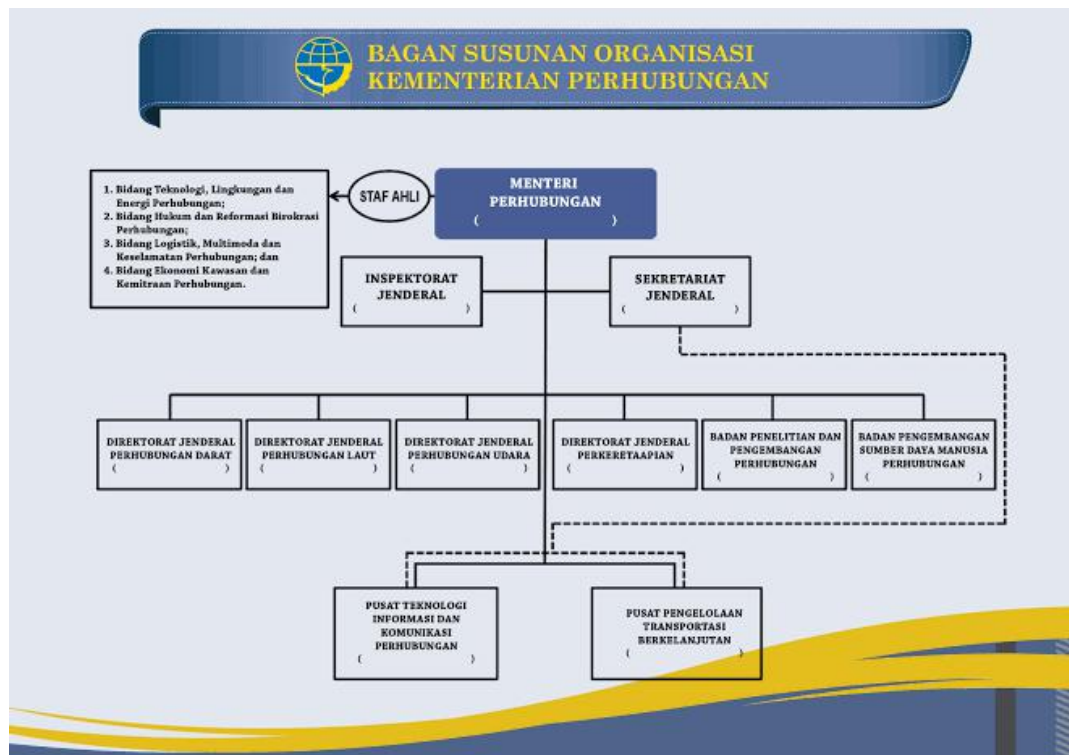
GAMBAR 2.1 Lambang Kemenhub

Lampiran 9 : Logo Kementerian Perhubungan

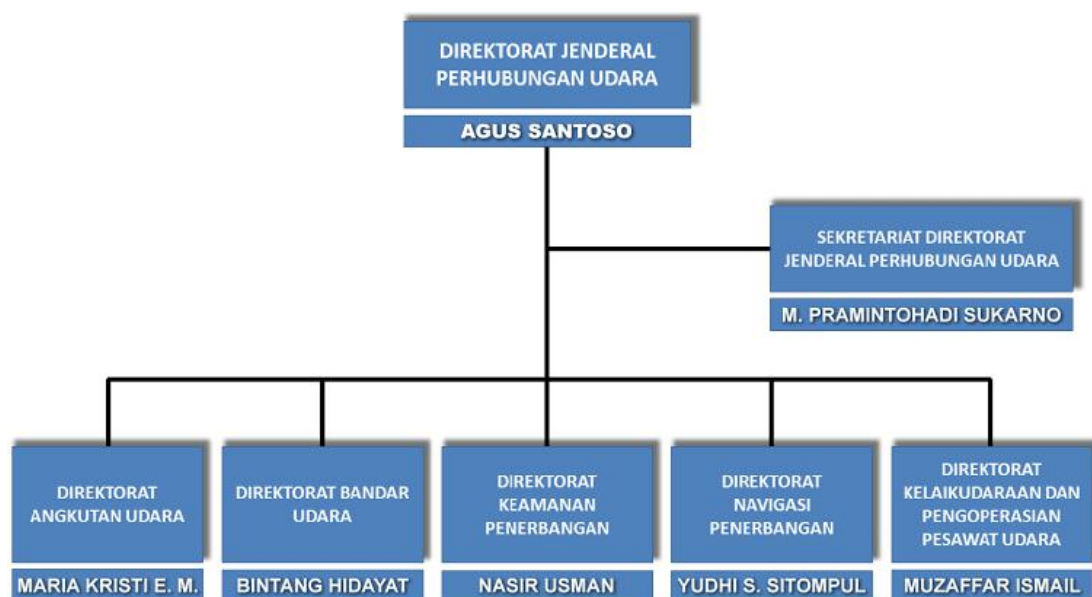


Gambar 2.2 Logo Kemenhub

Lampiran 10 : Stuktur Organisasi Kementerian Perhubungan



Gambar 2.3 Bagan Susunan Organsasi Kemenhub



Gambar 2.4 Bagan Susunan Organisasi Dirjen Perhubungan Udara

Lampiran 11 : Tampilan Neraca Satuan Kerja Bandara Sentani

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAFI1T
Tanggal : 31/10/17
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROPINSI : 2500 PAPUA
SATUAN KERJA : 288550 BANDARA SENTANI
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 Juni 2017	31 Desember 2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	0	150,000,000	0.00
Uang Muka Belanja (prepayment)	3,417,500,000	3,417,500,000	0	0.00
Piutang Bukan Pajak	21,462,018,527	73,686,400,557	(52,224,382,030)	(70.87)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(2,563,569,241)	(1,967,373,961)	(596,195,280)	30.30
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>18,898,449,286</i>	<i>71,719,026,596</i>	<i>(52,820,577,310)</i>	<i>(73.64)</i>
Persediaan	127,830,700	1,373,387,971	(1,245,557,271)	(90.69)
JUMLAH ASET LANCAR	22,593,779,986	76,509,914,567	(53,916,134,581)	(70.46)
ASET TETAP				
Tanah	361,422,515,000	361,422,515,000	0	0.00
Tanah Belum Diregister	(310,396,000)	0	(310,396,000)	0.00
Peralatan dan Mesin	487,604,776,600	487,604,776,600	0	0.00
Gedung dan Bangunan	203,154,376,177	202,479,376,177	675,000,000	0.33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	982,822,926,227	982,822,926,227	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,943,190,000	10,943,190,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3,791,541,200	0	3,791,541,200	0.00
Akumulasi Penyusutan	(1,028,766,164,706)	(960,263,140,223)	(68,503,024,483)	7.13
JUMLAH ASET TETAP	1,020,662,764,498	1,085,009,643,781	(64,346,879,283)	(5.93)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	241,466,000	241,466,000	0	0.00
Aset Lainnya yang Belum Diregister	310,396,000	0	310,396,000	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(242,578,500)	(241,466,000)	(1,112,500)	0.46
JUMLAH ASET LAINNYA	309,283,500	0	309,283,500	0.00
JUMLAH ASET	1,043,565,827,984	1,161,519,558,348	(117,953,730,364)	(10.15)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	150,000,000	0	150,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	150,000,000	0	150,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	150,000,000	0	150,000,000	0.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,043,415,827,984	1,161,519,558,348	(118,103,730,364)	(10.16)
JUMLAH EKUITAS	1,043,415,827,984	1,161,519,558,348	(118,103,730,364)	(10.16)

Lampiran 12 : Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISAS ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	53,091,925,000	66,140,772,518	13,048,847,518	124.58
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	53,091,925,000	66,140,772,518	13,048,847,518	124.58
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	53,091,925,000	66,140,772,518	13,048,847,518	124.58
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	20,655,386,000	9,268,456,792	(11,386,929,208)	44.87
	Belanja Barang	70,538,411,000	20,637,581,536	(49,900,829,464)	29.26
	Belanja Modal	74,024,020,000	3,791,541,200	(70,232,478,800)	5.12
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	165,217,817,000	33,697,579,528	(131,520,237,472)	20.40
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0	0.00

Jakarta, Februari 2011
Kepala Kantor

Drs. M.Syaifudin Lutfi
NIP. 060083254

Kode Lap. : LRASS
Tanggal : 31-10-17
Halaman : 1
Prog Id : lu_pastk

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON I : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : 2500 PAPUA
SATUAN KERJA : 288550 BANDARA SENTANI
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Lampiran 13 : Tampilan Laporan Operasional

Tanggal : 31/10/17
 Kode Laporan: lu_Josatker
 Halaman : 1

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2017 DAN 2016
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROPINSI : 2500 PAPUA
 SATUAN KERJA : 288550 BANDARA SENTANI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0.00
Pendapatan Cukai	0	0	0	0.00
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0.00
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,914,930,488	27,424,160,661	(13,509,230,173)	49.26
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,914,930,488	27,424,160,661	(13,509,230,173)	(49.26)
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	13,914,930,488	27,424,160,661	(13,509,230,173)	49.26
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	9,268,456,792	10,367,540,712	(1,099,083,920)	(10.60)
Beban Persediaan	452,986,171	210,645,728	242,340,443	115.04
Beban Barang dan Jasa	12,795,144,186	13,839,131,467	(1,043,987,281)	(7.54)
Beban Pemeliharaan	7,525,380,900	10,695,981,620	(3,170,600,720)	(29.64)
Beban Perjalanan Dinas	1,109,498,450	890,503,200	218,995,250	24.59
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	0.00
Beban Bunga	0	0	0	0.00
Beban Subsidi	0	0	0	0.00
Beban Hibah	0	0	0	0.00
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	68,018,404,527	86,260,986,902	(18,242,582,375)	(21.14)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	596,195,280	1,090,273,835	(494,078,555)	(45.31)
Beban Transfer	0	0	0	0.00
Beban Lain-Lain	0	0	0	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	99,766,066,306	123,355,063,464	(23,588,997,158)	25.38

Lampiran 14 : Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas

Tanggal : 31/10/17
 Kode Laporan: lu_pesatker
 Halaman : 1

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2017
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROPINSI : 2500 PAPUA
 SATUAN KERJA : 288550 BANDARA SENTANI

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 JUNI 2017	30 JUNI 2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	1,161,519,558,348	1,310,328,096,365	(148,808,538,017)	(11.35)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(85,849,804,918)	(95,759,690,759)	9,909,885,841	(10.34)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(485,732,456)	0	(485,732,456)	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(485,732,456)	0	(485,732,456)	0.00
Koreksi Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(31,768,192,990)	47,110,634,722	(78,878,827,712)	(167.43)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(118,103,730,364)	(48,649,056,037)	(69,454,674,327)	142.76
EKUITAS AKHIR	1,043,415,827,984	1,261,679,040,328	(218,263,212,344)	(17.29)

Jakarta, Februari 2011
 Kepala Kantor

Drs. M.Syaifudin Lutfi
 NIP. 060083254

Lampiran 15 : Tampilan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA		% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
				JUMLAH S/D SEMESTER YANG LALU	SEMESTER INI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TRANSAKSI KAS							
0	RUPIAH MURNI							
04	EKONOMI							
08	TRANSPORTASI							
09	Program Pengadaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara							
1965	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dijen Pendukung Udara							
994	Layanan Pendukung							
51	PENGEMBALAN BELANJA PEGAWAI							
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511119	Pengembalian Belanja Pembulanan Gaji PNS							
511134	Pengembalian Belanja Tunj. Kompetensi Kerja PNS							
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	0	1,288	1,288	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 1965 994	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 1965	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 04 06 09	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 04 08	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 04	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATEK 00	0	0	0	189,093,188	189,093,188	0.00	0

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN
SEMESTER I TAHUN 2017
 (dalam rupiah)


KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : 2500 PAPUA
 SATUAN KERJA : 288550 BANDARA SENTANI
 JENIS SATUAN KERJA : 00 KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBS 02
 Tanggal : 31-10-17
 Halaman : 1
 Prog.id : lu_lrapbakts

Lampiran 16 : Dokumentasi dengan Pegawai Kementerian Perhubungan




Lampiran 17 : Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227/4706283, Fax: (021) 4706283
 Laman: www.ic.uinj.ac.id



KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Reno Suciati Purni

2. No.Registrasi : 810512227

3. Program Studi : Pendidikan Ekonomi

4. Dosen Pembimbing : Ibu Dra. Sri Zulainah, M.Si
 NIP. 19810228198000001

5. Judul PKL : Laporan Praktis Beta Lapangan
Pada Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	2 November 2017	Isi dan format Laporan PKL	- Menekankan gambar dan tabel ke lampiran	✓
2			- Tugas PKL dibao & dibikin point-point	✓
3	14 November 2017	Isi dan format Laporan PKL	- Font selain BAB & Judul tidak boleh capital semua	✓
4				
5	16 November 2017	Isi dan format Laporan PKL	- Menekanan Laporan	✓
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12			SETUJU UNTUK UJIAN PKL	✓

Catatan :
 1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan